

Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

ntera TV Media

Government (Hal.2)
Kloter Pertama
Haji Indonesia Tiba
di Madinah

SOROTAN BERTUBI-TUBI BEA CUKAI

Viral Pajak Peti Mati hingga Kepala di Purwakarta Dilaporkan KPK

TIGA KASUS YANG VIRAL TERKAIT BEA CUKAI

X Pengiriman sepatu yang mendapat

Pengguna media sosial TikTok @radhikaalthaf mengeluhkan besarnya beban bea masuk di Indonesia untuk sepatu impor yang ia beli. Dia bercerita perihal pengenaan bea masuk sebesar Rp 31,8 juta untuk pembelian sepasang sepatu seharga Rp 10,3 juta.

X Pengiriman action figure yang mendapat pengenaan Bea Masuk dan Pajak:

Youtuber Medy Renaldy juga mengungkap bahwa pengiriman barang mainan robot yang dikirimkan ke dia untuk konten review pernah dikenakan bea masuk yang berbeda dengan harga sebenarnya.

X Pengiriman hibah keyboard untuk Sekolah Luar Biasa (SLB)

Terdapat barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitakan sebagai barang kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) pada 18 Desember 2022. Adapun belakangan ini di media sosial X baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah.

Be a Cukai
r a m a i
disorot masyarakat.

Berbagai kasus bertubi-tubi

menimpa salah satu garda terdepan pengaman penerimaan megara ini. Terbaru, Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara bernama dan beberapa rekan pengacaranya dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm. Buntutnya, atas dasar hasil pemeriksaan internal, Rahmady Effendy sudah dibebastugaskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rahmady diduga tidak memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dengan benar. Hal ini mulanya diketahui setelah adanya aktivitas bisnis antara pejabat Bea Cukai tersebut dengan klien Andreas, Wijanto Tirtasana sejak 2017. Sebelumnya, media sosial X diramalkan informasi tentang importasi peti jenazah yang dipungut bea masuk sebesar 30 persen karena dianggap sebagai barang mewah. Meski akhirnya diketahui bila pungutan biaya terhadap peti jenazah tersebut datang dari pihak swasta, bukan Bea Cukai. Sebelumnya deretan kasus lain juga menjadi konsenasyarakat. Ada keluhan viral soal besarnya beban bea masuk di Indonesia untuk sepatu impor hingga hibah alat untuk tuna netra yang tertahan di bea cukai sejak 2022.

Baca di hal 11....



Kloter Pertama Haji Indonesia Tiba di Madinah

JAKARTA-Sebanyak 393 jamaah haji Indonesia kloter (kelompok terbang) pertama tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Minggu (12/5/2024) waktu Arab Saudi.

Kloter pertama yang tiba ini berasal dari embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG-01).

Mereka terbang dengan Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA 7301. Tiba di Bandara AMAA Madinah, jemaah disambut dengan fasilitas fast track, sehingga tidak perlu lagi melewati proses pemeriksaan imigrasi maupun bea cukai.

Kedatangan perdana jamaah haji Indonesia ini disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad. Hadir juga, Konjen RI Jeddah Yusron Bahauddin Ambariy, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, dan Kepala Daker Bandara Abdillah.

"Banyak di antara jamaah dengan usia di atas 70 tahun, saya kira dengan cara fast track seperti ini sangat terbantu karena mereka tidak perlu lama-lama antri di airport," ujarnya.

Layanan fast track merupakan salah satu wujud kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. "Kami berterima kasih atas kerja sama ini. Kami berharap ini diteruskan. Ini merupakan program yang sangat baik yang bisa membantu jamaah," katanya.

Dubes Abdul mengatakan jemaah telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Adanya fast track dapat memberikan jemaah kesempatan untuk istirahat.

Abdul juga mengapresiasi kesiapan petugas haji dalam melayani jamaah. "Layanan petugas untuk jemaah sudah bagus. Sudah teratur, langsung siap menyambut jemaah di bawah pintu. Saya kira ini inisiatif yang sangat baik," katanya.

Indonesia tahun ini memberangkatkan sekitar 241 ribu jemaah, dari total tersebut, 21 persen atau



Jamaah haji Indonesia kloter pertama tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Minggu (12/5/2024) waktu Arab Saudi. (Dok.Kemenag)

45.678 jamaah masuk dalam kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas.

Sedangkan dari kloter pertama yang baru saja tiba, terdapat 79 jamaah lansia dengan 12 di antaranya membutuhkan layanan kursi roda.

PBNU soal Visa Resmi

Sementara, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) K.H. Mahbub Maafi Ramdan, mengatakan, praktik haji ilegal di luar prosedur atau manasik tanpa visa haji bertentangan dengan substansi syariat Islam. Praktik ilegal ini, lanjut dia, selain membahayakan pelakunya, juga membahayakan jamaah haji secara umum.

Hal itu disampaikan merespons adanya sebagian umat Islam Indonesia yang nekat berangkat ke tanah suci tidak menggunakan visa haji; visa resmi yang diterbitkan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA).

"Praktik haji ilegal telah merampas

[ghashab] hak [kenyamanan] jamaah haji yang kuotanya terdistribusi ke banyak negara. Praktik haji ilegal "membunuh" ruang gerak jamaah haji dunia," kata Kiai Mahbub dalam keterangannya, Minggu (12/5/2024).

Mahbub menjelaskan, praktik haji ilegal akan memunculkan banyak masalah bagi yang bersangkutan dan jamaah haji dunia.

"Baik darurat layanan kamar kecil, serangan cuaca panas karena tidak mendapat tenda Arafah, kepadatan jemaah tak terkendali di titik-titik kritis area haji [seperti terowongan Mina, area tawaf dan sai], keterbatasan oksigen di tengah lonjakan kerumunan," katanya.

"Kemacetan lalu lintas di area haji, maupun ketidaktenangan sebagai buronan razia aparat otoritas KSA yang selalu menghantui selama melaksanakan ibadah haji," ujar dia.

Lebih jauh, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mematuhi prosedur formal dan regulasi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah KSA maupun ketentuan negara asal jemaah dalam hal ini undang-undang seputar perhajian yang berlaku di Indonesia.

"Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan prosedural dapat mengantisipasi berbagai mudarat perhajian yang potensi terjadi dan mendatangkan kemalalahan sehingga rangkaian manasik haji dapat terselenggara dengan baik, layak, dan nyaman," tandasnya.

BSI Berangkatkan 83% Jamaah

Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memberangkatkan 178.770 ribu jamaah haji tahun 2024 atau setara dengan 83 persen dari sekitar 213 ribu jemaah dari Indonesia.

"Setiap tahun jumlah nasabah calon haji yang menabung di BSI terus meningkat dengan rata-rata 80 persen dari total jemaah Indonesia mendaftar lewat BSI," kata Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna di Jakarta, Minggu (12/4/2024).

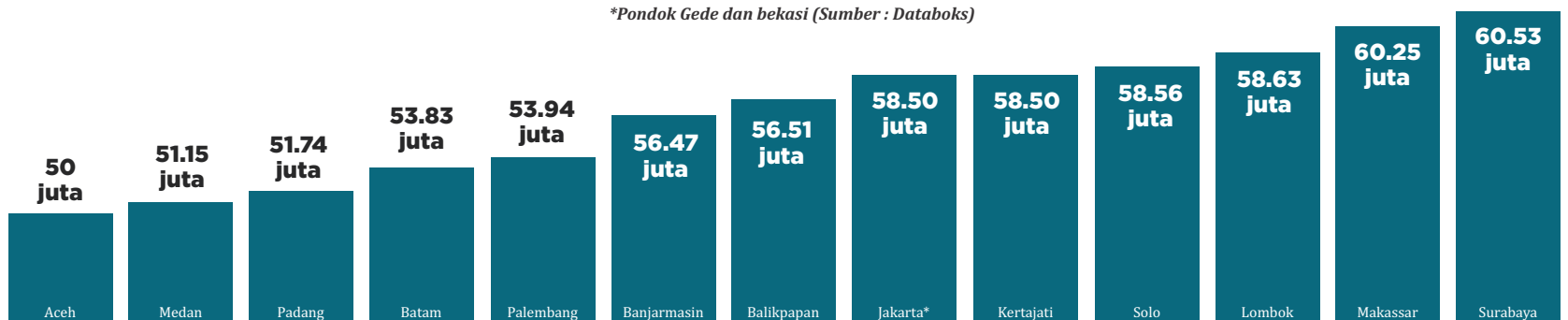
Per Maret 2024, Tabungan Haji BSI konsisten tumbuh 8,2 persen (year-on-year/yoy) dengan jumlah rekening mencapai 5 juta dan total dana pihak ketiga (DPK) Rp11,67 triliun.

BSI berharap kelolaan tabungan haji mencapai 5,9 juta rekening pada tahun ini. Sementara itu, jumlah pendaftar haji yang menabung di BSI sampai dengan Maret 2024 mencapai 3,6 juta jemaah. Jumlah tersebut mencakup sekitar 64 persen dari total jemaah waiting list haji reguler Indonesia.

Anton menjelaskan jemaah haji yang mendaftar lewat BSI akan memperoleh layanan manasik di embarkasi di kota dan kabupaten, fasilitas kartu debit mabrur dengan fasilitas gratis tiga kali tarik tunai per bulan di Arab Saudi, cashback belanja di merchant di Arab Saudi dengan minimal berbelanja Rp10 juta di Arab Saudi, hingga layanan penukaran uang riyal di embarkasi haji. (wid,r/ls, ist/dya)

BIAYA HAJI 2024 BERDASARKAN EMBARKASI (10 JANUARI 2024)

*Pondok Gede dan bekasi (Sumber : Databoks)



Polemik Kenaikan UKT di Sejumlah PTN

Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Logis dan Tak Relevan

JAKARTA - Beberapa waktu terakhir media sosial ramai membahas mengenai aksi protes mahasiswa terkait adanya kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri terutama yang berstatus berbadan hukum atau PTNBH. Hal tersebut pun menuai respon dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.

Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), di mana pihak Universitas memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar, termasuk kemandirian otonomi di bidang akademik maupun non akademik.

"Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan," kata politisi Fraksi Golkar ini, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.

Adapun beberapa kampus yang tergolong PTNBH menerapkan kenaikan UKT di antaranya adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed), dan yang kemudian mendapat reaksi hingga rektor melaporkan mahasiswa ke polisi terjadi di Universitas Riau (Unri).

Dilansir dari laman resmi dpr.go.id, berbagai upaya telah dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah kampus tersebut untuk melunasi biaya UKT yang harus mereka bayar, misalnya dengan mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga menggunakan opsi yang berisiko yakni dengan berutang.

Masalah ini sempat ramai dan viral di media sosial dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.

Meskipun demikian, menurut Hetifah, seharusnya PTN dapat memanfaatkan status PTNBH sebijak mungkin untuk meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa.

Ia menyayangkan apa yang telah terjadi, PTNBH memang diberikan keleluasaan untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta



(ilustrasi) Salah satu poster aksi menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai menyengsarakan orangtua. (Dok)

guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti pihak Universitas bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa yang sifatnya justru memberatkan.

Oleh karenanya, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTNBH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Tujuannya adalah agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus tidak memberatkan mahasiswa.

Bagaimana Aturan UKT?

Pemerintah mewajibkan setiap perguruan tinggi negeri untuk memiliki setidaknya dua kelompok uang kuliah tunggal (UKT), yaitu

kelompok 1 sebesar Rp500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp1 juta.

Dua kelompok ini biasanya menjadi tarif terendah yang diterapkan berbagai perguruan tinggi negeri.

Di luar itu, mereka bebas menambah jumlah kelompok UKT dan menentukan besarnya. Makanya, ada perguruan tinggi yang bisa memiliki lima atau lebih kelompok UKT.

Penentuan kelompok UKT yang didapat mahasiswa biasanya berdasarkan pada kondisi ekonomi keluarga atau pihak yang membiayainya. Semakin seorang mahasiswa dianggap mampu, semakin besar pula besaran UKT-nya.

Jumlah mahasiswa yang mendapat tarif UKT kelompok 1 dan 2, serta penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu, setidaknya harus

mencapai 20% dari seluruh mahasiswa baru program diploma dan sarjana yang diterima perguruan tinggi tiap tahunnya.

Besaran UKT tidak boleh lebih besar dari biaya kuliah tunggal (BKT) di masing-masing program studi.

BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa di sebuah program studi di perguruan tinggi negeri.

BKT ditetapkan oleh direktur jenderal terkait di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan memperhitungkan besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

SSBOPT mencakup keperluan pengadaan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel, yang nilainya bisa beragam, tergantung akreditasi program studi dan perguruan tingginya, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah masing-masing kampus.

Pada Januari - Februari lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menerbitkan dua dekret baru, yaitu Peraturan Menteri No. 2/2024 dan Keputusan Menteri No. 54/P/2024.

Melalui dua regulasi itu, Nadiem menaikkan BKT dengan mengikuti standar biaya tahun 2023, merevisi kebijakan sebelumnya yang menetapkan BKT dengan standar 2019. Karena BKT naik, batas atas UKT pun meningkat. Sekali lagi, itu karena UKT boleh ditetapkan sejalan dengan BKT, asal tak lebih tinggi.

Karena itu, berbagai perguruan tinggi negeri menaikkan tarif sejumlah kelompok UKT-nya, yang memicu gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah. (Wid,rls,ist,ant/dya)



POSTUR PAGU ALOKASI ANGGARAN 2024 DITJEN DIKTIRISTEK

Bus Maut Subang

KNKT: Bus Biasa Disulap Jadi High Decker



Petugas memeriksa bagian dalam bus pasca kecelakaan yang menewaskan 11 orang, menurut polisi setempat, di Subang, Jawa Barat (11/5/2024). (afp)

SUBANG- Satu per satu fakta bus maut Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater Subang, Sabtu (11/5/2024) malam terkuak. Paling baru, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat turun langsung memeriksa bangkai kendaraan mengatakan armada adalah bus biasa disulap jadi high decker.

"Jadi kita dalam inspeksi ini, fokus terhadap sistem pengereman dari bus, yang diakui sang sopir sesaat sebelum kecelakaan remnya bermasalah," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, saat melakukan inspeksi terhadap bus maut Putera Fajar di Terminal Subang, Minggu (12/5/2024) sore.

Bangkai bus yang menelan 11 korban jiwa dan 33 luka luka tersebut di periksa terkait sistem kelaikannya terutama sistem pengeremannya. Dikatakannya, pengecekan terhadap bus untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang dialami bus tersebut.

Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi High Decker, juga disorot. "Perubahan tersebut bisa saja mempengaruhi keseimbangan kendaraan," ucapnya.

Bus High Decker body busnya lebih tinggi dari normal deck (3- 3,3 meter) yakni 3,5 meter. Bus ini bisa mengangkat penumpang sebanyak 50 hingga 60 penumpang. Posisi sopir lebih rendah dari bangku penumpang.

KNKT juga mengecek sistem keselamatan lainnya. Ditemukan bahwa rangka bus dianggap tidak safety. "Kita cek juga terkait sabuk pengaman, dan rangka bus yang dirasa tidak bisa melindungi penumpang di kala terjadi benturan," tuturnya.

Soal hasil inspeksi ini, Soerjanto belum bisa memastikan kapan hasilnya bisa keluar sebab data dari inspeksi ini perlu dikalibrasi dengan data lainnya seperti data dengan wawancara sopir.

"Ya semoga saja secepatnya, hasil inspeksi ini bisa segera disimpulkan, sehingga bisa diketahui apa penyebab terjadinya kecelakaan maut tersebut," katanya.

Terpisah, Kadishub Wonogiri Waluyo ikut bicara. Bus itu memiliki pelat dengan awalan AD 7524 OG. Kode AD pada pelat menunjukkan bahwa bus itu beroperasi di Solo Raya.

Kadishub Wonogiri mengatakan, bus itu statusnya AKDP. Ia pun heran bus itu bisa beroperasi di Subang. "Kami tidak tahu bus itu tiba-tiba beroperasi sampai ke Subang. Saat di Wonogiri status bus masih AKDP (Antarkota Dalam Provinsi)," kata Waluyo kepada wartawan, Minggu (12/5/2024).

Informasi dihimpun, kendaraan bus besar itu merupakan tipe HINO/AK1JRKA dan nama pemilik bus masih tertulis PT Jaya Guna Hage.

Waluyo menyebut, bus itu terakhir kali melakukan uji KIR pada 6 Juni 2023.

"Bus tersebut terlambat uji KIR ke Dishub Wonogiri. Masa Uji KIR itu berlaku hingga 6 Desember 2023," bebernya.

Ia mengaku mendapatkan informasi bus tersebut sudah tidak lagi beroperasi di Wonogiri. Dishub Wonogiri akan memberikan peringatan agar pemilik tertib melakukan uji KIR. "Kami juga peringatkan pengusaha bus lain di Wonogiri untuk tertib melakukan uji KIR di Dishub Wonogiri," pungkasnya.

Disorot Media Asing

Sejumlah media asing ikut menyoroti kecelakaan bus yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Media-media tersebut menyoroti rendahnya standar keselamatan berkendara di Indonesia yang menyebabkan

seringnya terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa.

Di antara media asing yang menyoroti peristiwa nahas ini adalah Channel News Asia, AFP dan Associated Press News.

Channel News Asia menulis setidaknya 11 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika bus yang membawa siswa SMA Lingga Kencana untuk acara perpisahan mengalami kecelakaan. Bus itu membawa lebih dari 60 siswa dan guru dari Depok untuk berwisata dengan tujuan Lembang, Bandung.

Para siswa baru saja merayakan kelulusannya ketika bus kehilangan kendali dan menabrak mobil dan 3 motor, lalu terguling. "Dari penumpang yang tewas, 9 di antaranya adalah siswa dan satu lainnya adalah guru," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, dikutip dari CNA, Minggu, (12/5/2024).

Selain menewaskan penumpang bus, kecelakaan ini juga menewaskan seorang pengendara motor dan menyebabkan luka serius kepada penumpang lainnya. Kecelakaan ini diduga karena bus mengalami rem blong.

Sementara Media dari Prancis, Agence France-Presse (AFP) menulis kecelakaan lalu lintas yang fatal kerap terjadi di Indonesia, karena kendaraan seringkali sudah tua atau tidak terawat dengan baik. Media ini juga menyoroti peraturan lalu lintas yang sering diabaikan.

AFP juga mengungkit kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 Tol Cikampek yang terjadi pada saat musim mudik Lebaran 2024. Kecelakaan itu menyebabkan 12 orang tewas.

Associated Press (AP) membuka laporannya dengan kronologis terjadinya kecelakaan bus SMK Lingga

11 KORBAN TEWAS BUS TERGULING DI SUBANG

1. Intan Rahmawati
2. Dimas Aditya
3. Desy Yulyanti
4. Ahmad Fauzi
5. Intan Fauziah
6. Nabila Ayu Lestari
7. Raka
8. Robiatul Adawiyah
9. Tyara
10. Mahesya Putra
11. Suprayogi.

DAFTAR LAKA MAUT BUS PARIWISATA

Tahun 2022, sebuah bus pariwisata juga mengalami kecelakaan di Tol Surabaya dan menewaskan 14 orang.

Pada 2021, terjadi insiden bus pariwisata masuk jurang di Sumedang, Jawa Barat akibat rem blong dan menewaskan 27 orang penumpang.

Kencana. AP menulis bus itu menabrak mobil dan motor setelah mengalami rem blong di Jawa Barat. Kecelakaan itu menewaskan 11 orang yang kebanyakan siswa dan melukai puluhan lainnya.

AP News menulis kecelakaan sering terjadi di Indonesia karena rendahnya standar keselamatan jalan raya dan infrastruktur. Tahun 2022, sebuah bus pariwisata juga mengalami kecelakaan di Tol Surabaya dan menewaskan 14 orang. Pada 2021, terjadi insiden bus pariwisata masuk jurang di Sumedang, Jawa Barat akibat rem blong dan menewaskan 27 orang penumpang. (wid,rls,afp,cna/dya)

Dirugikan Aturan Usung Pasangan Calon di Pilkada, Partai Buruh Gugat ke MK

JAKARTA - Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Undang-Undang Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Materi permohonan ke MK sudah kami siapkan, tinggal menunggu beberapa pemohon tambahan dari perorangan bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota yang akan bersama-sama Partai Buruh menjadi Pemohon di MK," kata Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh Said Salahudin dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (12/5/2024).

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa hanya partai politik (parpol) yang memiliki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang bisa mengusung pasangan calon di kontestasi Pilkada. Menurut Partai Buruh, aturan itu tidak konstitusional, karena tidak adil.

"Aturan itu jelas tidak adil. Setiap parpol yang memperoleh suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024, baik yang memperoleh kursi DPRD maupun yang tidak memperoleh kursi DPRD, seharusnya diberikan hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon," ujar Said.

Said menyebut hal itu sejatinya telah ditegaskan oleh MK sejak 19 tahun lalu. Berdasarkan putusan MK ketika itu, kata dia, sejak Pilkada 2005 semua parpol diperbolehkan mengusulkan pasangan calon termasuk untuk parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang parpol atau gabungan parpol bisa mengumpulkan akumulasi suara sah sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

"Dulu, dalam aturan Pilkada yang tidak serentak mulai tahun 2005-2013, syarat pengusulan pasangan calon dengan menggunakan perolehan suara ditentukan minimal 15 persen, maka pada masa itu semua parpol non-seat pun bisa ikut mengusulkan pasangan calon di Pilkada dengan cara berkoalisi," katanya.

Said menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya aturan pilkada serentak dengan skema peralihan (transitional provision) mulai 2015-2020, setidaknya ada dua perubahan aturan.

Pertama, ambang batas (threshold) pengusulan pasangan calon dengan menggunakan perolehan suara dinaikan dari 15 persen menjadi 25 persen. Kedua, berubahnya aturan tentang parpol yang diperbolehkan untuk mengusulkan paslon.

"Kalau sebelumnya berdasarkan Putusan MK, semua parpol yang memperoleh suara sah di Pemilu boleh



Maskot Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) yakni Si Teda yang merupakan kepanjangan dari Tegaron Pilkada diperkenalkan ke publik. (Dok)

mengusulkan paslon, tetapi sekarang hak itu dibatasi hanya untuk parpol yang mempunyai kursi DPRD saja. Di sini masalahnya," ujar Said.

Menurut dia, pembentuk Undang-Undang Pilkada Serentak seharusnya tidak memuat norma yang substansinya sudah dibatalkan MK. Ia menyebut MK pernah mengatur kata "atau" pada ketentuan syarat pengusulan paslon menggunakan kursi atau menggunakan suara harus dimaknai sebagai alternatif diantara dua pilihan.

"Kalau parpol atau gabungan parpol mau mengusung paslon dengan menggunakan kursi DPRD, silakan. Kalau mau mengusung dengan menggunakan perolehan suara pun diperbolehkan. Ketentuan itu berlaku bagi parpol yang punya kursi maupun parpol yang tidak punya kursi DPRD," ujar Said.

Dia menambahkan, kata "atau" menurut MK juga harus dimaknai sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan paslon yang diusung oleh partai yang tidak memiliki kursi di DPRD agar bisa ikut serta dalam Pilkada.

Hakim MK Wanti-wanti soal Sirekap

Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 kembali menuai polemik.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung Sirekap dalam sidang sengketa pemilihan umum legislatif atau pileg di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Rabu (8/5/2024).

Saat itu, Arief memimpin sidang panel tiga perkara nomor 20-01-04-01/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golkar. Partai beringin ini menduga ada penambahan suara Partai Gerindra untuk anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Dipal 6.

Salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Aceh, Yusriadi, mengungkapkan ada perbedaan suara dalam hasil rekapitulasi perhitungan secara manual pada formulir D Hasil Kecamatan dengan Sirekap yang dicetak menjadi dokumen. Sehingga, menurutnya, mengganggu tahapan rekapitulasi jumlah suara yang benar.

Arief lantas menyahuti, "Kira-kira itu berarti Sirekap sebagai alat bantu itu malah mengacaukan ya?"

Arief melanjutkan, begitu rekapitulasi perhitungan secara manual sudah selesai, seharusnya Sirekap yang dicetak juga menampilkan hasil serupa. Menurut dia, permasalahan perbedaan hasil rekapitulasi secara manual dengan Sirekap terjadi di semua tingkatan.

"Apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekapnya jadi bermasalah. Memang Sirekap tidak bisa digunakan, karena bermasalah terus itu ya Pak Holik (Idham Holik) ya. Untuk catatan, karena nanti sebentar lagi pilkada," Arief mengingatkan.

Anggota Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, Sirekap sudah pasti dievaluasi. Evaluasi, menurutnya, merupakan fungsi manajerial yang melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan ini, katanya, juga berbasis pada manajemen.

"Sirekap sudah pasti dievaluasi, dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sumber materi perencanaan perbaikan kualitas Sirekap ke depan, untuk kepentingan pilkada," ujar Idham.

Idham juga menanggapi sorotan Hakim Konstitusi Arief terhadap Sirekap. Dia menjelaskan, KPU berkomitmen untuk lebih baik dalam penyelenggaraan pilkada yang profesional.

"KPU akan mewujudkan pemberian layanan informasi publik atas hasil perolehan suara Pilkada melalui Sirekap," tutur Idham. (wid,rls,ist/dya)

FAKTA- FAKTA ATURAN USUNG PASANGAN CALON DI PILKADA

- Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Undang-Undang Pilkada): Hanya partai politik (parpol) yang memiliki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang bisa mengusung pasangan calon di kontestasi Pilkada.

- Berdasarkan putusan MK sejak Pilkada 2005 semua parpol diperbolehkan mengusulkan pasangan calon termasuk untuk parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang parpol atau gabungan parpol bisa mengumpulkan akumulasi suara sah sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

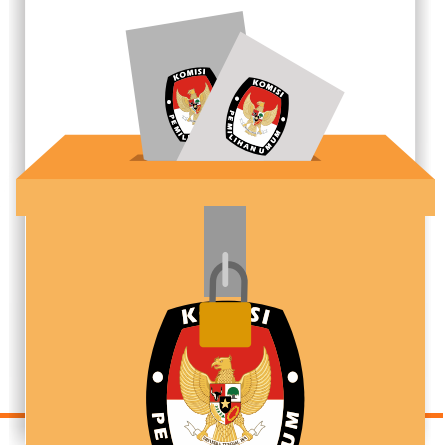
1. Ambang batas (threshold) pengusulan pasangan calon dengan menggunakan perolehan suara dinaikan dari 15 persen menjadi 25 persen.

2. Berubahnya aturan tentang parpol yang diperbolehkan untuk mengusulkan paslon.

- Peserta pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah:

1. Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau

2. Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.



Potensi Investasi Rp 100 M, Pengusaha Kota Malang Siap Sulap Bangunan Mangkrak Jadi Pasar Modern

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyebut ada investor lokal tertarik mengubah bangunan mangkrak di lahan bekas playground, Jalan Cianjur, Kecamatan Klojen, menjadi sebuah Pasar Modern.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, proyek ini memiliki potensi investasi mencapai Rp 100 miliar. Arif berharap, langkah ini mampu memberikan angin segar bagi ekonomi kota, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

"Pengajuannya sih di lahan bekas playground, belakang Taman Makam Pahlawan (TMP) Untung Suropati. Sifatnya nanti (investor) menyewa lahan tersebut, untuk pasar modern," ujar Arif, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (12/5/2024).

Arif menambahkan, pasar modern ini akan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Kota Malang. Dengan luas tanah mencapai 6000 meter persegi, menurutnya proyek ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Lebih lanjut, meskipun belum ada gambaran pasti tentang konsep pasar

modern tersebut, Arif mengaku jika pihak investor telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI selaku pemilik aset tanah, untuk menyewa lahan bekas playground yang terletak di belakang TMP Untung Suropati ini.

"Nah mudah-mudahan tahun ini progres perizinannya selesai, bisa untuk segera dibangun," terangnya.

Dengan adanya pembangunan pasar modern ini, Arif mengharapkan tingkat pengangguran di Kota Malang dapat turun signifikan, sementara perekonomian masyarakat dapat semakin meningkat. Arif menyebut, akan memberikan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja lokal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Kecamatan Klojen.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyambut baik rencana pembangunan pasar

modern tersebut.

Eko berharap, pasar modern nantinya akan menjadi penyeimbang bagi pasar tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya dan identitas Kota Malang.

"Justru keberadaan pasar modern

ini nanti bisa memotivasi pembenahan pasar tradisional di Kota Malang. Di sisi lain, pasar ini kan juga menyerap produk dari masyarakat. Jadi tidak ada istilah saingan. Malah bagus untuk kemajuan perekonomian Kota Malang," ungkap Eko. (Santi/Dya)



Bangunan mangkrak bekas playground di belakang Taman Makam Pahlawan (TMP) Jalan Cianjur, Klojen Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

Hasil Perikanan Melimpah, Pemkab Malang Akui Siap Dukung Program Makan Siang Gratis

MALANG - Potensi besar sektor perikanan di Kabupaten Malang disebut mampu mendukung salah satu program ketahanan pangan nasional. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, Minggu (12/5/2024).

Victor mengatakan, Pemkab Malang berkomitmen untuk mendukung program makan siang gratis yang diusung oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Victor, wilayah Kabupaten Malang memiliki dua potensi besar dalam sektor perikanan, yakni perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya. "Kalau untuk perikanan budidaya kita produksinya sekitar 12.000 ton per tahun. Produksi ikan nila sekitar 5.000 ton per tahun, ikan lele 6.000 ton per tahun," ujar Victor saat dikonfirmasi awak media, Minggu (12/5/2024).

Selain itu, Victor juga mengungkapkan keberagaman komoditas perikanan seperti ikan air payau, udang vanamei, ikan kemuru, dan ikan layang, yang berkontribusi



Bupati Malang, Sanusi didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, saat melakukan panen ikan di Kawasan Budidaya Nila, Kecamatan Lawang. (Dok. Dinas Perikanan Kabupaten Malang)

pada pasokan lokal maupun industri makanan kaleng.

"Jadi sekitar 1.000 ton per tahun diisi oleh produksi ikan air payau, udang vanamei, ikan kemuru, hingga ikan layang yang biasa digunakan

untuk produksi makanan kaleng berupa sarden," jelasnya.

Di sisi lain, perikanan tangkap laut Kabupaten Malang, sambung Victor, juga menonjolkan tiga jenis ikan unggulan, yakni Tuna, Cakalang, dan

Tongkol (TCT). Menurut Victor, produksi TCT tersebut bahkan mencapai hampir 9.000 ton per tahun, dengan mayoritas hasil dikirim ke luar daerah.

"Program makan siang gratis memerlukan lauk atau sumber protein hewani, kami Kabupaten Malang siap untuk mendukung kecukupan gizi dari protein yang bersumber dari ikan," tegas Victor.

Lebih lanjut, Victor juga menyampaikan persentase distribusi hasil tangkapan ikan, dimana sekitar 70 persen diekspor ke beberapa kabupaten/kota besar di Indonesia seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Denpasar.

Sementara itu, Victor juga menambahkan, para nelayan di Kabupaten Malang secara strategis membagi produksi untuk mencukupi kebutuhan lokal, industri ikan kaleng, serta pasar internasional. Menurutnya, hal ini menjadikan Kabupaten Malang sebagai kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan ikan baik di pasar domestik maupun internasional. (Santi/Dya)

DIDIET MAULANA

Ajak Pahami Sejarah

PERANCANG busana Didiet Maulana mengajak masyarakat yang menyukai modifikasi kebaya sebagai salah satu pilihan fesyennya untuk memahami sejarah dari busana nasional tersebut.

Hal itu diperlukan agar esens dari penggunaan kebaya dapat tetap terjaga meski sudah mendapatkan sentuhan moderenisasi.

"Ketika kita mau mendekonstruksinya sebaiknya kita harus tahu konstruksi asli kebaya itu seperti apa sih, dan seharusnya mengenakan kebaya itu juga memahami estetikanya seperti apa. Sehingga jangan sampe nanti pakai kebaya tapi kok terlalu seksi atau apa gitu," kata Didiet di Jakarta. Hal ini disampaikannya sebagai pengingat bagi para generasi muda yang saat ini kembali menggandrungi berbusana dengan menggunakan kebaya.

Tak hanya digunakan di acara-acara formal, penggunaan kebaya oleh generasi muda sebagai busana juga kini kembali merambah di keseharian dan untuk acara-acara santai seperti untuk menonton konser.

Maka dari itu Didiet menyampaikan pesan ini agar sebelum generasi muda melakukan modifikasi pada kebaya yang disesuaikan dengan tren masa kini untuk tetap bisa menyelami sejarah dari busana tersebut. Ia berharap generasi muda tetap bisa menjaga nilai dari kebaya sebagai warisan budaya nasional.

Ia pun merekomendasikan buku ciptaannya "Kisah Kebaya" yang memuat kisah dan esensi kebaya sebagai budaya di Indonesia. "Jadi kembalilah kepada akarnya, ketika mau mengenakan kebaya harus tahu kayak gimana makna pakai kebaya. Jangan sampe pakai kebaya tapi justru menodai makna kebaya itu sendiri," begitu pesan Didiet.

Dalam hal kebaya sebagai warisan budaya, baru-baru ini Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajukan kebaya sebagai warisan budaya ke Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).

Pengajuan itu dilakukan dengan mekanisme didaftarkan bersama atau joint domination dengan negara ASEAN lainnya.

Adapun pengajuan kebaya sebagai warisan budaya UNESCO dilakukan Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hasil pengajuan itu baru akan diketahui sekitar Agustus atau September 2024 saat sidang UNESCO berlangsung.

Profil

Meski berbekal pendidikan arsitektur, Didiet justru melabuhkan hatinya sebagai perancang busana. Ilmu arsitektur rupanya masih bisa ia pakai untuk menelurkan banyak busana yang fokusnya pada wastra Indonesia.

Sebelumnya, ia mengawali karier di Radio Oz Bandung, Staf Talent untuk MTV Indonesia, dan Kepala Marketing di PT. Gilang Agung Perkasa selama 7 tahun. Di tahun 2011, Didiet banting setir dengan membangun brand lokal IKAT Indonesia by Didiet Maulana. Waktu itu, ia belum menemukan desainer muda yang berani mengolah tenun ikat menjadi baju siap pakai.

Gak hanya itu, ia kemudian meluncurkan SVARNA by IKAT Indonesia yang fokus pada busana hinggil (premium). Ada pula Sarupa by IKAT Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan seragam dengan wastra Indonesia.

Sebagai perancang busana, Didiet gak tinggal diam. Ia merupakan orang yang gigih dan aktif mempelajari banyak hal, termasuk mengikuti

beberapa komunitas dan organisasi. Didiet merupakan anggota KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), anggota AMIN (Asosiasi Merek Indonesia), serta konsultan untuk perusahaan. (Antara/Idn)

PROFIL DIRI

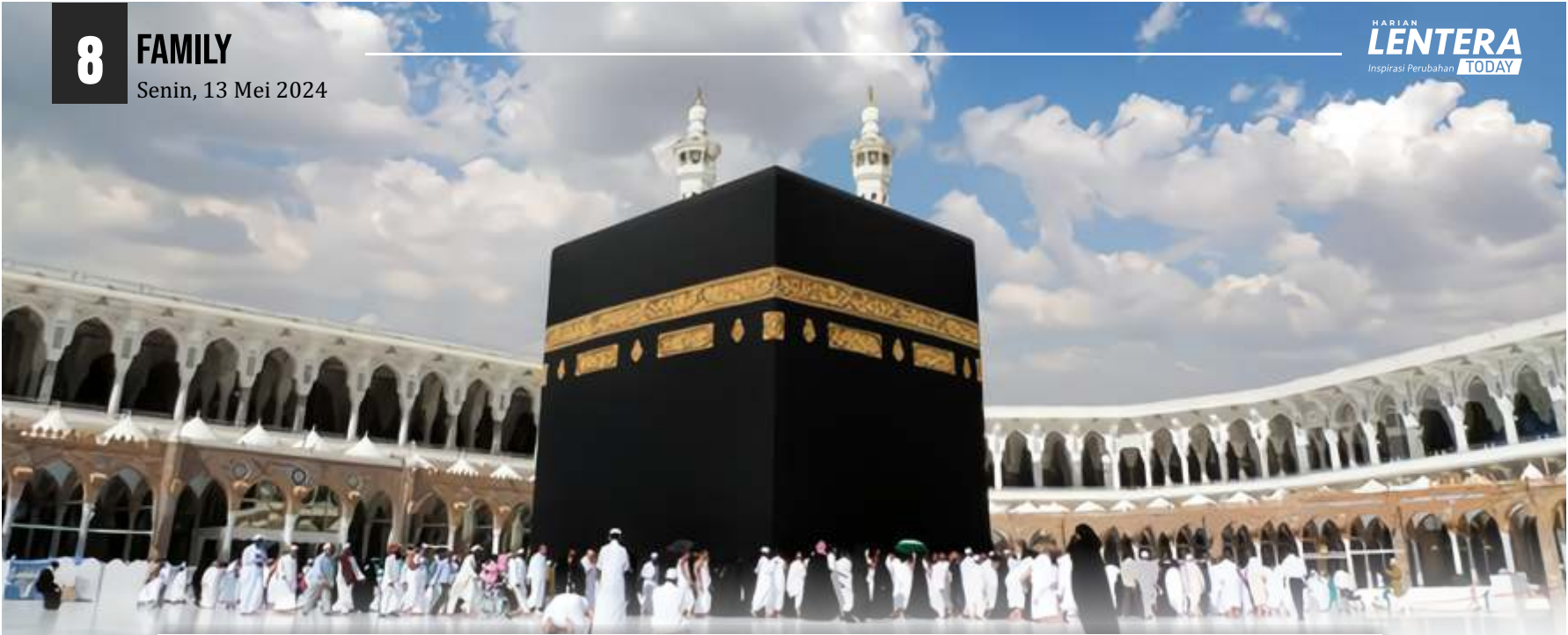
Tanggal Lahir:
18 Januari 1981

Pendidikan:
S1 Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan

Pekerjaan:
perancang busana, creativepreneur

Kebangsaan:
Indonesia





JAMAAH HAJI PERLU WASPADAI PENYAKIT ISPA

PENGURUS Pusat Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (PP Perdokhi) mengatakan jamaah haji perlu mewaspadaai adanya penularan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) selain meningitis dan dehidrasi.

“Ketika flu menyerang orang dengan usia senior dan memiliki penyakit komorbid, dapat berisiko berat. ISPA dan pneumonia pun masih menjadi penyakit terbanyak yang ditemui pada jamaah haji Indonesia selama penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi pada Tahun 2023,” kata Ketua Umum PP Perdokhi Dr. dr. Syarief Hasan Lutfie, Sp.K.F.R, MARS, AIFO-K di Jakarta.

Syarief menuturkan selain terdapat risiko bahaya penyakit meningitis atau radang selaput otak yang merupakan gangguan kesehatan akibat penyakit meningokokus invasif (IMD), penyakit seperti pneumonia dan influenza juga perlu diwaspadai karena menjadi kuman infeksi saluran napas.

Selama beberapa tahun terakhir infeksi saluran napas merupakan penyakit paling sering untuk jamaah Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Studi di Arab Saudi menunjukkan sekitar 60 persen jamaah yang berkonsultasi di Klinik Primer Mina datang dengan keluhan

infeksi saluran napas atas.

Sayangnya, ISPA itu datang usai jamaah mengabaikan gejala yang dirasakan dan tidak melakukan tindakan preventif. Akibatnya, gejala berlanjut sampai terkena pneumonia.

“Jamaah yang dirawat inap di rumah sakit hampir 40 persen disebabkan pneumonia. Sementara jamaah yang dirawat masuk ke ICU sebesar 67 persen disebabkan infeksi saluran napas,” katanya.

Syarief juga membeberkan berdasarkan hasil studi Balkhy yang dilakukan pada 500 pasien jamaah haji, ditemukan bahwa sebanyak 56 persen jamaah dengan infeksi saluran napas terbukti disebabkan virus influenza.

Dengan demikian, Syarief menganjurkan agar sebelum berangkat ibadah haji atau umroh jamaah sudah melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebagai bentuk proteksi diri ketika harus berbaur dengan jamaah dari negara lain di Arab Saudi.

“Inilah pentingnya jamaah membutuhkan vaksin influenza untuk memberikan proteksi diri selama menunaikan ibadah umroh,” ujar Syarief.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Kalventis Sinergi Farma Ridwan Ong

mengatakan sangat penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya vaksinasi menjelang ibadah umrah dan selaras dengan komitmen menyehatkan masyarakat Indonesia.

Umroh, menurutnya diminati banyak muslim di Indonesia karena biaya yang lebih terjangkau, jadwal yang lebih fleksibel, dan tidak tergantung pada kuota.

Hal ini dibuktikan dengan data dari Kementerian Agama yang menyatakan pada tahun 2023 ada sebanyak 1.368.616 jamaah umroh berangkat ke Tanah Suci.

Sebagai salah satu mitra, pihaknya telah membentuk komitmen dalam meneruskan inisiatif keberlanjutan melalui kolaborasi dan edukasi terkait manfaat vaksinasi.

“Kami percaya hal ini dapat mendukung upaya cakupan vaksinasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, termasuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi bagi para jamaah umroh agar tetap prima menjelang ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia,” ujar Ong.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta Naning Nugrahini

menekankan pentingnya penyiapan kondisi fisik sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah maupun haji.

Selain mempersiapkan rohani, jamaah yang hendak melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah dan haji diimbau menyiapkan jasmani.

Naning mengimbau jamaah yang hendak menunaikan ibadah umrah maupun haji disiplin menerapkan pola hidup sehat untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.

Jamaah umrah dan haji yang memiliki komorbiditas disarankan mengonsumsi obat rutin sesuai anjuran dari dokter, memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, mencukupkan minum air, mencukupkan istirahat, dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

Naning mengemukakan, jamaah umrah dan haji juga harus dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi yang dibutuhkan, termasuk vaksinasi meningitis dan influenza, sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Kita berisiko terkena penyakit pada saat berangkat ke luar Indonesia. Mungkin kalau yang muda kena batuk pilek tidak masalah, tapi yang sepuh itu bisa berkepanjangan, jadi mohon hati-hati,” kata dia (Antara)



“Ketika flu menyerang orang dengan usia senior dan memiliki penyakit komorbid, dapat berisiko berat. ISPA dan pneumonia pun masih menjadi penyakit terbanyak yang ditemui pada jamaah haji Indonesia selama penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi pada Tahun 2023,”

Dr. dr. Syarief Hasan Lutfie, Sp.K.F.R, MARS, AIFO-K

ZEEKR 007 KALAHKAN MANUSIA DALAM UJI COBA PARKIR

SISTEM parkir otomatis pada mobil Zeekr 007, jenama kendaraan elektrik milik Geely, dapat mengalahkan kemampuan manusia dalam uji coba parkir yang dilaksanakan pada Rabu (8/5), meskipun pengemudi mencatatkan waktu tercepat.

Menurut siaran CarNewsChina, pengujian tersebut mencakup pemasangan Zeekr 007 ke dalam tempat parkir mekanis selebar 2.060 mm, yang bisa jadi rumit karena kemiringan dan saluran untuk roda masuk, terlebih Zeekr 007 lebarnya 1.900 mm.

Tingkat keberhasilan sistem parkir otomatis Zeekr 007 menurut hasil pengujian 100 persen, jauh lebih tinggi dibanding tingkat keberhasilan pengemudi manusia yang sebesar 66,7 persen.

Namun demikian, produsen mobil tidak menyampaikan data detail mengenai jumlah pengemudi yang terlibat dalam pengujian dan jumlah upaya parkir yang dilakukan.

Salah satu keluhan umum tentang sistem parkir otomatis adalah terlalu lambat. Meskipun waktu parkir tercepat pengemudi manusia jauh lebih cepat ketimbang sistem, waktu rata-rata parkir menunjukkan hal yang berbeda.

Waktu parkir keseluruhan pengemudi manusia tercepat 31,75 detik sedangkan sistem parkir otomatis pada mobil paling cepat 51,75 detik.

Sedangkan waktu rata-rata parkir sistem pada mobil selama 57,85 detik dan pengemudi manusia agak lebih lambat, 64,07 detik.

Selain itu, catatan waktu parkir paling lambat yang dicapai oleh manusia 2 menit 40,57 detik, jauh lebih lambat dibandingkan

catatan waktu Zeekr 007 yang hanya 1 menit 13,50 detik.

Secara keseluruhan, Zeekr 007 lebih cepat daripada pengemudi dalam dua pertiga percobaan.

Mobil itu juga lebih unggul dalam hal parkir presisi, yang hanya dicapai dalam 38 persen percobaan pengemudi tetapi dapat dicapai dalam setiap percobaan menggunakan sistem pada mobil.

Uji coba parkir tersebut kemungkinan merupakan bagian dari promosi untuk pengembangan OS 6.1 di Zeekr 007, yang fungsi parkir cerdasnya ditingkatkan.

Fungsi tersebut mencakup sistem fisheye bird's eye view (BEV) yang dikembangkan oleh Zeekr untuk membantu mobil menghadapi lereng, kolom, dan rantai. Sebagai bagian dari proses parkir, mobil dapat secara otomatis menarik kaca spion samping.

Pengiriman pesanan Zeekr 007 telah dimulai pada Desember 2023. Lima model dalam kisaran

tersebut harganya mulai dari 209.900 yuan hingga 299.900 yuan atau sekitar Rp466 juta sampai Rp666 juta.

Inovasi teknologi

Zeekr ketika awal berdiri di 2021 meluncurkan Zeekr 001. Kendaraan SUV listrik itu memiliki penjualan positif sebanyak 71.941 unit pada tahun 2022 meski memiliki harga yang tidak murah.

Setelah 001, Zeekr memperkenalkan MPV Zeekr 009 dan SUV perkotaan Zeekr X, keduanya memiliki desain yang unik dan menyasar segmen pasar tertentu.

Pengenalan sedan Zeekr 007 dimaksudkan oleh perusahaan untuk menuju pasar yang lebih luas, sebuah langkah yang secara signifikan dapat meningkatkan kehadiran pasar Zeekr.

Meski detail spesifik tentang Zeekr 007 masih dirahasiakan, sedan tersebut diharapkan sudah menampilkan teknologi LiDAR, yang akan menjadi perta kali bagi Zeekr menggunakan teknologi tersebut.

Penggabungan LiDAR yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengemudi otonom, menunjukkan bahwa Zeekr 007 bukan hanya sebuah lompatan ke segmen pasar baru, tetapi, juga sebuah langkah maju dalam hal inovasi dan teknologi.

Zeekr mengirimkan 13.077 kendaraan pada bulan Oktober, mencatat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dengan ambisi untuk menggandakan pengirimannya menjadi sekitar 140.000 kendaraan tahun ini, Zeekr menargetkan rata-rata 24.000 kendaraan per bulan dalam dua bulan terakhir tahun ini (Antara





LEMAK TRANS, PICU KANKER PAYUDARA HINGGA PENYAKIT JANTUNG

ASAM lemak trans memicu berbagai masalah kesehatan, terutama meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Hal ini disebabkan adanya peningkatan HDL dan LDL kolesterol saat asam lemak trans dikonsumsi secara berlebihan.

"Asam lemak trans adalah asam lemak tidak jenuh yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap dalam konfigurasi trans," kata Prof. Dr. Didah Nur Faridah, SEAFAS IPB, dalam acara "Menuju Eliminasi Lemak Trans di Indonesia".

Asam lemak trans merupakan asam pada minyak nabati yang mengalami proses hidrogenasi. Adapun ada dua jenis asam lemak trans, yaitu asam lemak trans industrial (ALTi) yang merupakan hasil hidrogenasi parsial minyak nabati dan memiliki kadar lemak parsial mencapai 60%.

Lalu, asam lemak trans (ALTr) yang dihasilkan dari produksi ruminansia, seperti sapi, domba, dan kambing, dengan kadar lemak ruminansia 6%.

Didah menuturkan mengonsumsi ALTi secara berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang berujung kepada kematian.

Salah satu negara yang mengalami hal tersebut adalah Belanda, yang hampir 10% penduduknya meninggal akibat persoalan itu.

Menurutnya, terdapat masalah kesehatan lain yang mengintai akibat asam lemak trans, yakni resistensi insulin, risiko PJK, diabetes, triasilgliserol, hingga kanker.

Senada dengan Didah, Direktur

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes, menjelaskan konsumsi asam lemak trans tidak hanya menyerang jantung, tapi juga menyebabkan kanker payudara.

"Selain penyakit jantung lemak trans menyebabkan kanker payudara, kemudian terkait langsung juga dengan risiko preeklamsia. Kemudian juga sistem kehamilan, memperpendek masa kehamilan/ keguguran, kemudian juga gangguan sistem saraf, kanker usus besar, diabetes, obesitas, dan alergi," jelas Eva.

Selain itu, imbas dari masalah kesehatan jantung menasar masalah otak yang menyebabkan stroke. Dia mengatakan dampak asam lemak trans memiliki sumbangsih besar terhadap masalah kesehatan.

Datangnya penyakit diperparah dari pola hidup masyarakat Indonesia yang lebih banyak mengonsumsi kandungan lemak dan jarang berolahraga, sehingga kadar lemak dalam tubuh lebih banyak dibandingkan protein maupun serat lainnya.

"Karena masyarakat Indonesia selain dia tingginya konsumsi lemak itu sendiri, dia juga kurang aktivitas fisik untuk bisa memecahkan lemak itu. Kemudian dia juga kurang konsumsi buah dan sayur sebagai serat," ungkapnya.

"Ada 95% masyarakat Indonesia kurang makan buah dan sayur, kemudian ada sekitar 33,5% dia kurang aktivitas fisik, dan untuk lemaknya sendiri 26,7%," imbuhnya.

Dalam kesempatan acara tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menginginkan Indonesia seperti negara Denmark yang berhasil menekan kematian akibat penyakit jantung sebesar 20%, melalui regulasi tersebut.

"Denmark adalah negara pertama yang melarang asam lemak trans industri pada makanan. Dan ini sudah dilakukan sejak 2003, berarti 20 tahun yang lalu," pungkasnya.

Lemak trans menyebabkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah meningkat, serta menurunkan kadar kolesterol baik (HDL).

Penelitian menunjukkan bahwa lemak trans buatan memiliki efek yang lebih buruk terhadap kesehatan dibandingkan lemak trans dari sumber alami.

Makanan yang Tinggi Lemak Trans

Untuk mengurangi risiko munculnya penyakit-penyakit di atas, konsumsi lemak trans perlu dibatasi hingga maksimal 2 gram per hari.

Beberapa makanan yang mengandung banyak lemak trans adalah:

- Kue-kue yang dipanggang, donat, cookies, dan pie yang biasanya terbuat dari minyak sayur yang telah dipadatkan (partially hydrogenated oils).

- Keripik kentang, keripik jagung, dan popcorn

microwave yang biasanya dimasak dengan lemak trans untuk menyedapkan rasa dan membuatnya lebih awet.

- Makanan yang digoreng, seperti ayam goreng dan kentang goreng. Kadang minyak yang digunakan adalah minyak sayur biasa, namun proses menggoreng dengan temperatur tinggi dapat menyebabkan terbentuknya lemak trans, terutama bila minyak tersebut sudah digunakan berulang kali.

- Margarin, mentega, dan creamer kopi yang sering digunakan sebagai pengganti produk susu dalam membuat kopi.

- Piza, crackers, dan biskuit kalengan (Bisnis/Alodokter)



Sorotan Bertubi-tubi ... (dari Hal 1)

KEPALA Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara bernama Andreas. Atas kasus tersebut, Andreas dan beberapa rekan pengacaranya dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm akan menyambangi Kantor Kementerian Keuangan pada Senin, 13 Mei 2024. "Kedatangan kami untuk menanyakan nasib surat kami," ujar Andreas Minggu (12/5/2024).

pengaduan masyarakat yang dikirimkan pada 28 Maret 2024. Ia mengaku sudah dua kali melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan. Surat Terakhir dikirim pada 22 April 2024.

Surat pengaduan tersebut berisi laporan terhadap Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady yang diduga tidak memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dengan benar. Hal ini mulanya diketahui setelah adanya aktivitas bisnis antara pejabat Bea Cukai tersebut dengan klien Andreas, Wijanto Tirtasana sejak 2017.

Sebelumnya Andreas mengatakan Wijayanto dan Rahmady menjalin kerja sama bisnis jasa ekspor impor pupuk sejak 2017. "Tahun 2017 klien saya meminjam uang kepada Rahmady senilai Rp 7 miliar," kata Andreas dikonfirmasi Tempo, Rabu, 8 Mei 2024.

Pinjaman tersebut digunakan untuk membangun perusahaan jasa ekspor impor pupuk PT Mitra Cipta Agro. Singkat cerita, Rahmady memberikan pinjaman itu dengan perjanjian secara lisan pengembalian dilakukan dengan membayar bunga Rp 75 juta setiap bulan. "Selain itu ada juga syarat agar istri REH dijadikan komisaris utama dan memegang saham 40 persen," kata Andreas.

Namun belakangan kliennya mengetahui bahwa Rahmady seorang pejabat pajak. Ia lalu menelusuri LHKPN Rahmady. Pada 2017 harta yang dilaporkan Rahmady nominalnya hanya Rp 3,2 miliar, bahkan hingga 2022 total harta Rahmady hanya Rp 6,3 miliar. "Lantas uang Rp 7 miliar yang dipinjamkan itu duit dari mana?" kata Andreas.

Setelah melaporkan ke KPK, Andreas mengatakan akan meminta kepastian hukum juga ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku belum mendapat informasi siapa dari pihak Kementerian yang akan menemui mereka.

Setelah melaporkan ke KPK, Andreas mengatakan pihaknya akan meminta kepastian hukum juga ke Kementerian Keuangan. Sudah dua kali pihaknya bersurat dan berniat menyambangi kantor Kementerian, Senin 12 Mei 2024, untuk menanyakan kepastian.

Terpisah, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menginformasikan bila yang bersangkutan sudah dibebastugaskan. "Atas dasar hasil pemeriksaan internal yang bersangkutan sudah dibebastugaskan," kata Nirwala.

Putusan bebas tugas menurut Nirwala berlaku sejak 9 Mei 2024. Nirwala berujar, sebelumnya internal Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan pemeriksaan internal terhadap pejabat tersebut. Hal ini guna memudahkan proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bea dan Cukai juga telah meminta keterangan dari pihak Pelapor. "Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi terjadinya benturan kepentingan yang juga turut melibatkan keluarga yang bersangkutan," kata Nirwala.

Kasus Peti Berakhir Minta Maaf

Seorang netizen akun X @ClarissaIcha menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan peti jenazah dipungut bea masuk dalam rangka impor. Netizen ini mengakui kekeliruannya.

"Atas dinamika publik yang terjadi akibat tweet dimaksud, saya mohon maaf dan ke depannya untuk mencoba lebih memahami aturan yang berlaku," tulis akun tersebut, Minggu (12/5/2024).

Akun Clarissa sudah menerima penjelasan dari Bea Cukai secara kelembagaan dan Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo. Dari penjelasan dua pihak itu, Clarissa meyakini tidak ada pungutan yang dimaksud.

"Biaya yang dipungut di Bandara Soetta dijelaskan adalah murni dari pihak swasta yang melakukan jasa pengurusan jenazah, sehingga di luar kebijakan apapun dari pihak kantor bea cukai," tegas Clarissa.

Clarissa mengapresiasi pihak terkait dalam membantu kelurusan informasi atau pemberian informasi yang akurat. Clarissa berjanji akan lebih memahami aturan yang berlaku.

Sebelumnya Clarissa mengunggah narasi terkait dugaan pungutan 30 persen oleh Bea Cukai terkait impor peti jenazah. Clarissa mengaku kesal

atas peristiwa tersebut.

"Kemarin ngelayat ayahnya teman, almarhum meninggal di Penang. Teman ini cerita kalau di airport dia harus bayar bea cukai 30% dari harga peti jenazah ayahnya, dianggap barang mewah! Ya peti memang tidak murah, tapi enggak ada waktu debat dan nunggu viral kan. Terlalu," tulisnya, Sabtu (11/5/2024).

Harta Dirjen Banjir Kritik

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Askolani, juga mendapat sorotan publik terkait harta kekayaannya.

Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Askolani diklaim mencapai angka fantastis hingga 51,8 miliar.

Selain itu, Askolani juga dikabarkan memiliki banyak tanah yang tersebar di Jakarta.

Kabar tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Banyak warganet dengan cepat menanggapi, mengungkapkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai sumber kekayaan yang begitu besar.

Tidak sedikit warganet yang mempertanyakan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Meski demikian, Askolani memiliki kekayaan yang mayoritas berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 17 miliar yang dirilis menurut data laporan KPK.

Aset tersebut terletak di beberapa wilayah, termasuk Bogor dan Jakarta, yang notabene merupakan lokasi dengan nilai tanah yang terus meroket.

Diketahui, terdapat bangunan seluas 36 meter persegi di Jakarta Utara hingga tanah seluas 312 meter persegi di Jakarta Timur.

Bangunan dan tanah itu diduga merupakan aset milik Askolani yang

diversifikasi secara luas.

Namun demikian, tak hanya nilai aset yang menjadi sorotan, melainkan juga peningkatan kekayaan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Menurut data laporan yang diperoleh, telah menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam surat berharga yang dimiliki Askolani, dari Rp 8,88 miliar menjadi Rp 19,53 miliar.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dimilikinya justru menunjukkan penurunan, dari Rp 15,31 miliar menjadi Rp 12,06 miliar.

Wakil Ketua KPK Dilaporkan

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dipolisikan buntut pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kini menjadi tersangka di KPK. Lantas apa kata Polda Metro Jaya?

Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi belum memberikan penjelasan terkait hal ini.

"Mohon waktu, saya cek dulu," kata Ade Ary.

Sebelumnya, Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto. Eko Darmanto dijera KPK sebagai tersangka pada Desember 2023, sementara pertemuan dengan Alexander pada Maret 2023.

"Saya belum dipanggil, baru staf yang diundang untuk klarifikasi," ucap Alex kepada wartawan. Alex menjawab pertanyaan soal sudah atau belum diperiksa penyidik kepolisian.

"Betul, saya bertemu ED (Eko Darmanto) di kantor didampingi staf dumas dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya. Waktunya sekitar awal Maret 2023," kata Alex.

Alex menyampaikan alasan pertemuan tersebut, yakni ED hendak melaporkan soal dugaan pelanggaran dalam importasi emas hingga baja.(tmp, wid,rls,ant/dya)

REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI (TRILIUN RUPIAH)

NO	JENIS PENERIMA	TARGET APBN	REALISASI		GROWTH (Y-O-Y,%)		CAPAIAN (%)
			2023	2024	2023	2024	
1.	BEA MASUK	57.37	12.32	11.85	9.00%	-3.82%	20.65%
2.	CUKAI	246.08	56.90	53.00	-0.72%	-6.86%	21.54%
	- Hasil Tembakau	230.41	55.24	51.20	-0.74%	-7.30%	-22.22%
	- Ethil Alkohol	0.10	0.03	0.03	-20.88%	16.21	31.43%
	- MMEA	9.33	1,61	1,72	0.58	6.58	18.42
	- Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.03	-9.96%	111.29%	-
	- Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	-15.42%	27.20%	-
	- Plastik	1.85	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	- MBDK	4.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.	BEA KELUAR	17.53	3.03	4.16	-71.66%	37.01%	23.71%
TOTAL		320.98	72.25	69.00	8.91%	-4.50%	21.50%
	PPN Impor		63.15	61.38	11.19%	-2.80%	11.19%
	PPn BM Impor		1.19	1.35	59.68%	13.91%	59.68%
	PPh Pasal 22 Impor		18.63	19.05	2.60%	2.29%	2.60%
	Total PDRI Lainnya		82.97	81.79	9.60%	-1.42%	9.60%
			155.22	150.79	0.13%	2.85%	0.13%

143 Negara Setuju Palestina Anggota Tetap PBB

JENEWA- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggelar pemungutan suara untuk menentukan resolusi terkait keanggotaan penuh Palestina di PBB, Jumat (10/5/2024) waktu Amerika Serikat.

Dilansir AFP dan BBC, Minggu (12/5/2024), dalam pemungutan suara, sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB. Sembilan negara menolak, dan 25 negara lain abstain.

Melansir Al Jazeera, sembilan negara yang menolak itu adalah Argentina, Republik Ceko, Hungaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini dan Amerika Serikat.

Menyambut hasil pemungutan suara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkata "Dunia bersama rakyat Palestina".

Resolusi Majelis Umum PBB ini memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina dalam organisasi tersebut.

Selain itu, resolusi ini juga berisikan permintaan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali pengajuan Palestina untuk menjadi anggota penuh ke-194 PBB.

Sekretaris Jenderal PBB mendesak 'gencatan senjata segera' di Gaza saat 35.000 warga Palestina tewas | Berita Perang Israel di Gaza 12 Mei 2024 oleh Dani Maulana.

Di sisi lain, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terus mengecam serangan Israel ke warga Palestina. Lembaga itu mendesak 57 negara anggotanya menajutahkan sanksi pada Israel.

Desakan itu dilakukan saat resolusi yang diadakan dalam akhir konferensi di Gambia. Sejumlah hal diminta OKI untuk bisa dilakukan oleh puluhan anggotanya.

Mulai dari menajutahkan sanksi terhadap Israel, kekuatan pendudukan, dan menghentikan ekspor senjata dan amunisi yang digunakan oleh tentaranya untuk melakukan kejahatan genosida di Gaza.

"Untuk melakukan tekanan diplomatik, politik dan hukum dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan pendudukan kolonial Israel, dan perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina, termasuk dengan menajutahkan sanksi," isi resolusi OKI yang dilaporkan AFP, dikutip Minggu (12/5/2024).

OKI juga meminta adanya gencatan senjata antar dua negara. Hal itu dilakukan secara permanen dan tanpa syarat apapun.

KTT OKI ke-15 itu hanya dihadiri segelintir pemimpin Afrika. Sebagian besar dari negara anggotanya hanya mengirimkan perwakilan. Sebagai informasi, OKI didirikan tahun 1969.



Pada Minggu (12/5/2024) sekitar 300.000 orang telah melarikan diri selama seminggu terakhir dari Rafah, selamatkan diri dari invasi Israel. (aawsat)

Yakni usai pembakaran masjid Al-Aqsa, Yerusalem.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden buka suara perihal negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Ia menjamin, gencatan senjata bisa terjadi dengan beberapa syarat.

Syarat utama, kata Joe Biden, jika Hamas mau melepaskan seluruh sandera warga Israel yang kini masih ditahan di Gaza.

"Seperti yang sudah saya katakan, terserah pada Hamas jika mereka ingin melakukannya (gencatan senjata), kita bisa mengakhirinya besok. Dan gencatan senjata (bisa saja) dimulai besok," kata Biden menghutip CNN, Minggu (12/5/2024).

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah memperbarui panggilannya untuk "gencatan senjata kemanusiaan segera" di Jalur Gaza karena pasukan Israel telah membunuh lebih dari 35.000 warga Palestina di wilayah yang terkepung sejak serangan dimulai pada bulan Oktober, kata pejabat.

Dalam sebuah video yang ditujukan kepada para donor internasional yang berkumpul di Kuwait pada hari Minggu, Guterres juga meminta "pembebasan semua tawanan yang ditahan oleh Hamas serta peningkatan bantuan kemanusiaan segera" ke Gaza.

"Gencatan senjata hanya akan menjadi awal," kata Guterres dalam video tersebut, memperingatkan bahwa "akan menjadi jalan yang panjang kembali dari kehancuran dan trauma perang ini".

Ketika Guterres mengulang permohonannya, pasukan Israel menyerang beberapa titik di Gaza, mengusur kembali ratusan ribu pengungsi yang sudah melarikan diri dari perang. Tank-tank Israel masuk ke Jabalia, sementara serangan-serangan membunuh puluhan orang di Beit Lahiya di utara dan Rafah di selatan.

Agen berita Palestina Wafa melaporkan bahwa setidaknya 12 mayat tiba di Rumah Sakit Kamal Adwan di kota Beit Lahiya setelah apa yang dijelaskan sebagai "pemboman karpet" Israel.

Dubes Israel Hancurkan Piagam PBB

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan dengan lantang menolak resolusi Majelis Umum yang menyetujui untuk memper-timbangkan kembali agar Palestina menjadi anggota penuh organisasi tersebut.

Dalam pidatonya di Majelis Umum usai voting, Erdan menuduh negara yang mendukung resolusi itu sama saja mendukung Hamas yang ia samakan seperti kelompok 'Nazi zaman modern'.

Erdan bahkan membawa mesin penghancur kertas ke atas podium sambil menghancurkan dua halaman kertas yang disebutnya merupakan Piagam PBB

"Saya ingin dunia menyaksikan tindakan amoral ini (voting). agar kalian semua juga berkaca bahwa (voting) ini, tindakan Anda semua, telah menghancurkan Piagam PBB. Kalian memalukan," kata Erdan di depan podium sambil menghancurkan kertas bertuliskan 'Piagam PBB' yang ia pegang.

Hingga saat ini, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 35.000 warga Palestina di wilayah yang terkepung sejak serangan dimulai pada bulan Oktober 2023.

Terbaru, Badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantu Palestina di Gaza mengatakan pada Minggu dini hari bahwa sekitar 300.000 orang telah melarikan diri selama seminggu terakhir dari Rafah, kota di ujung selatan enklave di mana lebih dari satu juta warga Gaza yang terusir mencari perlindungan dari serangan udara Israel di tempat lain selama tujuh bulan terakhir. (afp,bbc,cnn,ist/dya)

HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK TENTUKAN RESOLUSI TERKAIT KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PBB:

SETUJU (143):

A: Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan
B: Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Burkina Faso, Burundi
C: Cabo Verde, Cambodia, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Cuba, Cyprus
D: Democratic People's Republic of Korea (North Korea), Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic
E: East Timor, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia
F: France
G: Gabon, The Gambia, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana
H: Haiti, Honduras
I: Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Ivory Coast
J: Jamaica, Japan, Jordan
K: Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan
L: Laos, Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Luxembourg
M: Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar
N: Namibia, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway
O: Oman
P: Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal
Q: Qatar
R: Republic of Korea (South Korea), Russia, Rwanda
S: Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria
T: Tajikistan, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Turkey
U: Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan
V: Vietnam
Y: Yemen
Z: Zambia, Zimbabwe

MIENENTANG (9):

A: Argentina
C: Czech Republic
H: Hungary
I: Israel
M: Micronesia
N: Nauru
P: Palau, Papua New Guinea
U: United States

ABSTAIN (25):

A: Albania, Austria
B: Bulgaria
C: Canada, Croatia
F: Fiji, Finland
G: Georgia, Germany
I: Italy
L: Latvia, Lithuania
M: Malawi, Marshall Islands, Monaco
N: Netherlands, North Macedonia
P: Paraguay
R: Republic of Moldova, Romania
S: Sweden, Switzerland
U: Ukraine, United Kingdom
V: Vanuatu